

Rekomendasi Kebijakan

Perempuan sebagai penduduk Republik Indonesia yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki harus terwakili kebutuhan dan kepentingannya di dalam proses pembuatan kebijakan. Selain jumlahnya yang besar, partisipasi perempuan dalam Pemilihan Umum juga besar. Walaupun dalam kenyataannya, jumlah perempuan anggota DPR-RI yang terpilih sedikit. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap kehidupan politik dan publik perempuan adalah sebagai berikut:

- ◆ Mendorong keterbukaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam kehidupan publik dan politik, terutama di dalam proses pemilihan umum legislatif. Partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan media inkubator potensial dalam menghasilkan para pemimpin perempuan. Partai politik juga berperan dalam mensosialisasikan pendidikan politik yang berperspektif gender pada masyarakat. Partai politik perlu menggunakan momentum persiapan Pemilu 2014 untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih perempuan.
- ◆ Dalam melakukan pendidikan politik yang berperspektif gender bagi masyarakat, partai politik dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan akar rumput. Hal ini memberikan manfaat bagi keduanya dalam pemetaan permasalahan dan rekomendasi yang sesuai bagi masyarakat serta penjangkaran kandidat perempuan potensial. Menyambut Pemilu 2014, partai politik perlu mewajibkan para calegnya untuk memasukkan perspektif gender di dalam tiap kegiatan kampanye.
- ◆ DPR-RI perlu menambahkan aturan di Tata Tertib DPR-RI mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya dalam pemilihan pimpinan akan tetapi dalam penetapan anggota per komisi dan alat kelengkapan yang ada.
- ◆ Perempuan anggota DPR-RI sebagai *role model* perlu bekerjasama dengan kekuatan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi perempuan akar rumput, agar terbangun kekuatan sinergis dalam memaksimalkan fungsi representasi. Kerjasama ini dapat dilakukan ketika melakukan penyerapan aspirasi di masing-masing daerah pemilihan.

Catatan Akhir

- ¹ Diperoleh dari website BPS, http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40¬ab=4, diakses 22 Juli 2013.
- ² Angka Kematian Ibu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 masih berada di angka 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
- ³ Mujani, Liddle, Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan Publik. Jakarta: Juni 2012.
- ⁴ *Ibid.*
- ⁵ Diolah dari website DPR-RI, http://www.dpr.go.id/id/anggota/per_komisi, diakses 22 Juli 2013.

Penelitian ini dibuat atas dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Program Representasi. Pandangan yang dinyatakan dalam penelitian ini semata-mata merupakan tanggungjawab dari Women Research Institute (WRI) dan tidak mencerminkan pandangan USAID.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009-2011*. http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40¬ab=4, diakses 22 Juli 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007*. Jakarta: 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: 2010.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Daftar Anggota – Berdasarkan Komisi*. <http://www.dpr.go.id/id/anggota/per-komisi>, diakses 22 Juli 2013.
- Mujani, Liddle, Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan Publik. Jakarta: Juni 2012.

Partisipasi & Representasi Politik Perempuan

Pada momentum 15 tahun pasca reformasi, perjuangan perempuan Indonesia di arena politik formal menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Wacana partisipasi dan representasi politik perempuan memperlihatkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender secara kuantitatif. Namun praktik politik dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen belum menunjukkan pencapaian secara kualitatif.

Women Research Institute (WRI) sejak Agustus 2012 melakukan penelitian kebijakan mengenai Anggota DPR-RI Perempuan dan Kebijakan Kesetaraan Gender. Ringkasan kebijakan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap persoalan dan rekomendasi terhadap partisipasi dan representasi perempuan dalam politik.

Situasi Partisipasi Perempuan dalam Politik

Pertama, keterwakilan perempuan dalam DPR-RI hanya 18 persen, terlalu kecil dibandingkan proporsi penduduk perempuan yang mencakup 49,66 persen total populasi Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa menurut Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pembagian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.630.913 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa.

Kedua, mengingat rendahnya partisipasi perempuan dalam politik (dan ranah kehidupan lain) adalah persoalan struktural, rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik ini disebabkan oleh ketiadaan kebijakan afirmatif yang menjamin partisipasi dan akses perempuan dalam kehidupan berpolitik.

Mengapa Perempuan Perlu Berpolitik?

1. Penduduk Perempuan Masih Terpinggirkan

Berdasarkan data BPS tahun 2009, 70 persen dari 32, 35 juta jiwa penduduk miskin yang ada di Indonesia adalah perempuan. Kemudian, jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 dan peningkatan ini terjadi di wilayah pedesaan.

Policy Brief

September 2013

Panel Ahli

Edriana Noerdin, MA
Sita Aripurnami, MSc

Peneliti

Ayu Anastasia, S.Sos
Frisca Anindhita, SKM
Rahayuningtyas, SKM

Women Research Institute

Lembaga penelitian yang memfokuskan kerjanya dengan menggunakan analisis feminis
Jalan Kalibata Utara II No. 78
Jakarta Selatan - 12740
Tel. (62-21) 791.87149
Fax. (62-21) 798.7345
Email. office@wri.or.id
Website. www.wri.or.id

Tabel 1.
Persentase Rumah Tangga Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga 2009-2011¹

Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan											
Laki-laki			Perempuan			Laki-laki			Perempuan			Laki-laki			Perempuan		
2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
85.11	85.61	85.00	14.89	14.39	15.00	86.51	86.56	86.40	13.49	13.44	13.60	85.83	86.09	85.71	14.17	13.91	14.29

Perempuan dan Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang bahkan hingga menjelang berakhirnya MDGs juga masih belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini diperparah dengan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tingginya Angka Kematian Ibu² menunjukkan bahwa kondisi perempuan masih terpinggirkan. Oleh karena itu, pentingnya perempuan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kebijakan adalah hal mutlak.

2. Partisipasi versus Representasi Politik Perempuan

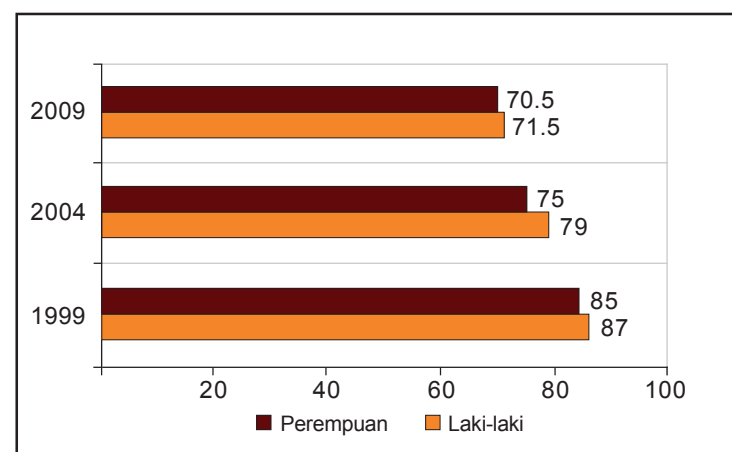
Terdapat sejumlah studi yang menyatakan bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam politik dibandingkan laki-laki (Mujani, Liddle, Ambardi; 2012), terutama yang berkaitan dengan ruang publik. Secara umum, laki-laki lebih aktif dalam politik dibandingkan perempuan. Partisipasi perempuan dan laki-laki yang hampir sama besar hanya terjadi ketika memilih calon legislatif, sementara ketika masa kampanye partisipasi perempuan sangat minim di ruang publik.

Berdasarkan tingkat partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye, perbedaan ini tidak sekedar disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin.

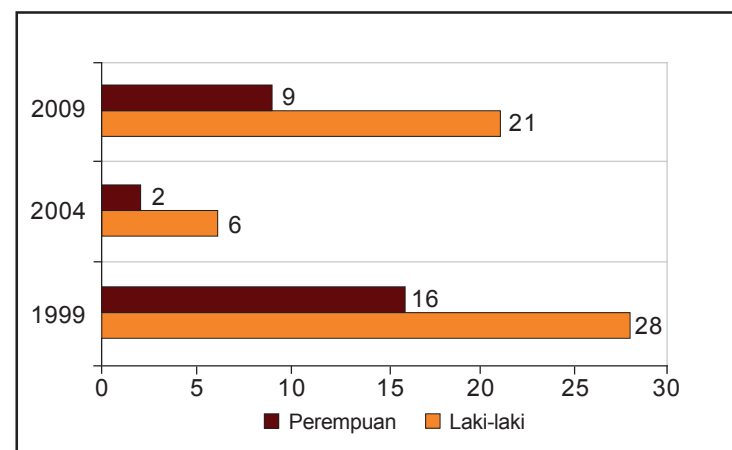
Menurut Burnes, Verba, Schlozman (dalam Mujani, Liddle, Ambardi; 2012) penyebab perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik adalah:

- ◆ Perempuan cenderung lebih rendah tingkat pendidikannya
- ◆ Perempuan cenderung lebih sedikit mendapat kesempatan aktif dalam kegiatan publik
- ◆ Perempuan lebih sedikit peluang untuk bekerja
- ◆ Perempuan cenderung menjadi warga kelas dua

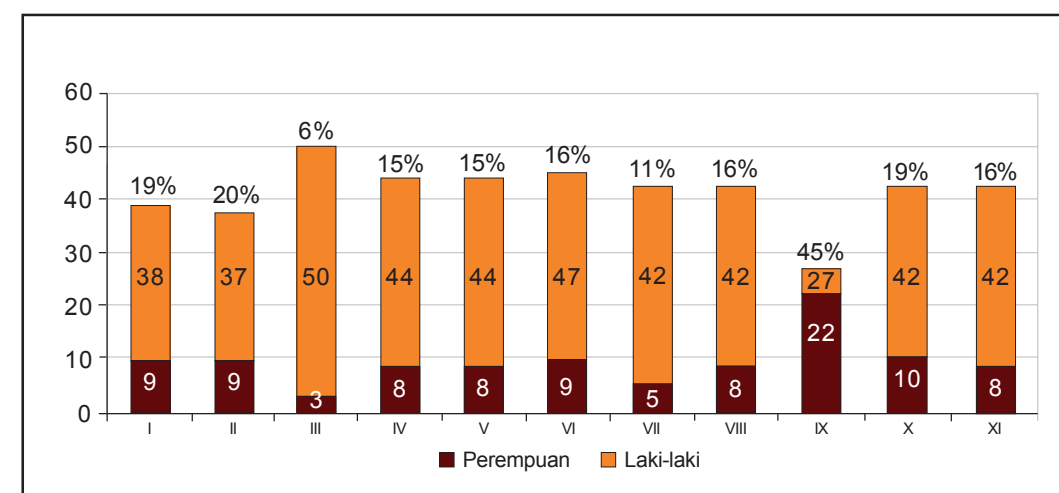
Gambar 1.
Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif 1999-2009 menurut Jenis Kelamin³



Gambar 2.
Partisipasi Kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif 1999-2009 menurut Jenis Kelamin⁴



Gambar 3.
Sebaran Gender pada Alat Kelengkapan Komisi⁵



Repro: kompas.com

Perempuan dan Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang bahkan hingga menjelang berakhirnya MDGs masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, pentingnya perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada isu representasi, Pemilu 2009 menunjukkan peningkatan jumlah anggota perempuan DPR-RI dibandingkan Pemilu 2004 (dari 11,09 persen menjadi 18,04 persen).

Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2009, dari 104.099.785 suara sah pemilih, 22,45 persen (16.134.959) diberikan untuk caleg perempuan dan 77,54 persen (55.730.151) diberikan untuk caleg laki-laki. Padahal, jumlah pemilih perempuan dan laki-laki yang mencoblos pada Pemilu 2009 hampir sama besar.

Setelah terpilih, anggota perempuan DPR-RI hanya difokuskan kepada komisi yang dianggap *women friendly* sehingga sebarannya tidak merata. Kondisi ini juga terjadi di dalam alat kelengkapan DPR-RI lainnya. Perempuan mayoritas ditempatkan di Komisi IX (Tenaga kerja, Kependudukan dan Kesehatan) dan Komisi X (Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga). Sementara yang paling sedikit berada pada Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan). Hal ini disebabkan tidak adanya perangkat kebijakan yang mengatur. Dalam Tata Tertib DPR-RI, pengaturan mengenai keterwakilan perempuan hanya disinggung pada tata cara pemilihan pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan DPR-RI.